



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL *GROSS SPLIT* TERHADAP
DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MINYAK
DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NANANG TIO ANDIKA

11427103827

JURUSAN ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MIGAS”**, yang ditulis oleh :

NAMA : NANANG TIO ANDIKA

NIM : 11427103827

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2021

Pembimbing Skripsi,


H. Mohd. Kastulanj, S.H., M.H.
NIP. 19630909 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil Gross Split Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak dan Gas Bumi"* yang ditulis oleh :

Nama : **NANANG TIO ANDIKA**
 NIM : **11427103827**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 30 Juni 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring/ Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., M.H.



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. HAJAR, M. Ag.
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

NANANG TIO ANDIKA (11427103827, 2021), TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL *GROSS SPLIT* TERHADAP DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

Skripsi ini membahas tentang aturan skema bagi hasil pada industri minyak dan gas bumi di Indonesia dan mencoba menganalisa terkait bentuk aturan skema bagi hasil *gross split* yang diatur oleh Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split*, terhadap daya investasi saham kontraktor minyak dan gas bumi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Teknik penulisan ini adalah deskriptif, yaitu melakukan pengumpulan data kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan bahan primer berupa Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, lalu bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, peraturan skema *gross split* terbaru memberikan kebebasan kontraktor untuk memilih bentuk skema bagi hasil pada industri minyak dan gas bumi, yaitu *gross split*, *cost recovery*, dan bentuk lainnya. Ini menyebabkan tidak baiknya daya investasi saham kontraktor, karena terdapat beberapa faktor penting yang diabaikan pihak pemerintah dalam menetapkan peraturan skema bagi *gross split*. Kemudian daripada itu terdapat penilaian aturan *gross split* yang prematur karena terlalu sering melakukan perubahan dan mengabaikan salah satu tujuan daripada dibentuknya skema bagi hasil *gross split* tersebut yaitu menyederhanakan system birokrasi industri minyak dan gas bumi.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil *Gross split* Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak dan Gas Bumi”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.

2. Orangtua penulis tercinta, Bapak Supriadi dan Ibu Samini, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Paman Rudi Hartono dan Bibi Suhayatin yang telah penulis anggap Orangtua kedua, karena beliaulah penulis dapat mencapai jenjang pendidikan seperti saat ini. Segala motivasi, keikhlasan, kesabaran, pengorbanan serta memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Kakak Rizal Effendi, Susi Eliawati (Almh), Sri Eka Handayani dan Rianti, serta adik Yogi Prastio dan Yuda Perwira yang telah memberikan dukungan dan harapan serta do'a. Keluarga besar Bapak dan Ibu, Kakek dan Nenek, Abang dan Kakak, yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu dan Bapak Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Firdaus, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dra. Yusliati, M.A, sebagai penasehat akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada Sahabat Hasan As'ari SH, Pedro Relian SH, M. Nur Ihsan SH, Adi Saputra SH, Wahyu Intan Sawitri S.Sy, Sahadi SH, Suharmen SH, terimakasih atas bantuan motivasi, tenaga, dan pemikiran baik yang selalu diberikan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Seluruh keluarga Ilmu Hukum A dan Hukum Bisnis C yang telah menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Tim KKN Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu : Berall Moga Sahid (Alm), Rahmad Basuki, Saharudin, Romi Arianto, Wahyu Intan Sawitri, Syara Fransiska, Amelia Utami, Pani Rahmawati, Syofina Arika, Zulfa Zainur, Fatri Wahyuni, Yaci Hari Yasmi.

Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya. Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Mei 2021
Penulis,

Nanang Tio Andika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM SKEMA BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	17
A. Pembentukan Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i> di Indonesia	17
B. Pengaturan Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	21
C. Kedudukan Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i> dalam Sistem Perindustrian Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	24
BAB III LANDASAN TEORI	25
A. Teori Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian	27
3. Macam-Macam Perjanjian	29
4. Penyusunan, Struktur, Dan Anatomi Perjanjian	32
B. Teori Investasi Saham	34
1. Pengertian Investasi dan Saham	34
2. Pasar Modal	37
3. Untung Rugi Investasi Saham	38
C. Teori Industri Minyak dan Gas Bumi	40
1. Pengertian Industri Minyak dan Gas Bumi	40
2. Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN	43
A.	Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	43
1.	Kronologi Penerbitan Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	43
2.	Analisa Perubahan Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	46
3.	Analisa Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi	51
B.	Kendala Yang Terdapat Dalam Skema Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Terhadap Daya Investasi Pada Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi	55
BAB V	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur publik ternyata telah menjadi kebutuhan yang mendasar di Indonesia dalam upaya mempercepat laju pembangunan terutama untuk membangun sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas pendidikan, rumah sakit, pasar dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu terdapat beberapa peraturan hukum dan menjadi payung hukum terhadap perjanjian kerjasama tersebut, antara lain Keppres Nomor 7 Tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, kesemuanya itu merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan berbagai undang-undang yang lainnya.¹

¹ Jurnal, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.20 Mimbar Hukum, Vol. 25, 2013, h.56, dari <https://jurnal.ugm.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.² Selain perjanjian, dapat dikenal pula istilah kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, *contract*. Mariam Darus Badruzaman menerangkan kontrak adalah sebuah Perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.³ Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Setiap negara berhak memilih salah satu sistem atau model perjanjian kerjasama dengan pihak swasta maupun asing dalam bidang apapun yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Model kontrak apa saja yang dipilih pada dasarnya tidak masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar kontrak dan hak-hak dasar negara terpenuhi, dan kontrak itu bisa menumbuhkan perekonomian serta sumber devisa atau pemasukan negara. Sebagai salah satu contoh yaitu bidang industri minyak dan gas bumi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di

² Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni 2001) h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak negara. Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang berbisnis untuk mengangkat cadangan minyak dan gas bumi (hidrokarbon) yang ada di bawah bumi menuju ke permukaan. Sifat industri minyak dan gas bumi adalah sebuah industri yang mahal (membutuhkan biaya besar), global, dan penuh dengan resiko. Sebab industri minyak dan gas bumi memerlukan peralatan dan teknologi yang canggih agar dapat memastikan adanya hidrokarbon di bawah bumi. Industri minyak dan gas bumi atau perminyakan bukanlah hal yang baru, bisnis minyak dan gas bumi sudah berkembang sejak awal era 1900an di era *rockafaller* dengan standar oilnya. Minyak dan gas bumi di angkat kepermukaan memiliki tingkat atau tekanan yang sangat tingi dan mudah terbakar, itu sebabnya industri ini memiliki operasi dengan resiko yang sangat besar. Hal ini juga menyebabkan biaya pengangkatannya (*lifting cost*) sangat mahal.⁴

Di Indonesia, industri minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut minyak dan gas bumi) merupakan salah satu komoditas utama Indonesia yang paling besar menyumbang devisa bagi Negara. Oleh karena sumber daya minyak dan gas bumi adalah sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia, dan juga menguasai hajat hidup orang banyak, Konstitusi tidak menghendaki adanya kepemilikan individu atas sumber daya alam tersebut, oleh karena itu pengelolaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan pengelolaan industri minyak dan gas bumi secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan

⁴ <https://www.safetyshoe.com/tag/industri-minyak-dan-gas-bumi/>, tanggal 07 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu meliputi eksplorasi dan produksi, sedangkan untuk kegiatan usaha hilir meliputi kegiatan pengolahan, transportasi, dan pemasaran.⁵ Dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, Eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi, adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan bumi.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Indonesia mengembangkan pola kontrak bagi hasil. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak bagi hasil di Indonesia melalui peraturan menteri dibagi menjadi kontrak bagi hasil *cost recovery sliding scale* dan kontrak bagi hasil *gross split sliding scale*. Kontrak bagi hasil *cost recovery sliding scale* adalah suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu yang bagi hasilnya progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.⁶ Sedangkan kontrak bagi hasil *gross split sliding scale* atau disebut *gross split* adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross*

⁵ Affina Niken Al-Islami, *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak dan gas bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 9 tahun 2013)*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, h.3.

⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.⁷ Kontrak bagi hasil *gross split* yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split* adalah perubahan mendasar pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah selama puluhan tahun menggunakan mekanisme kontrak bagi hasil konvensional yang menggunakan mekanisme *cost recovery*.

Namun dalam perjalanannya yang belum genap satu tahun, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mengalami perubahan sehingga di terbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* guna menyesuaikan kondisi yang ada. Kemudian mengalami perubahan kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, dan terakhir pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross*

⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

split. Berbeda dengan maksud dan tujuan dari diterapkannya skema bagi hasil *gross split* yaitu memperbaiki iklim investasi dan menyederhanakan system birokrasi pada industri hulu minyak dan gas bumi. Skema bagi hasil *gross split* sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan pada iklim investasi. Melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* memberikan kemudahan bagi investor guna melakukan perbaikan iklim investasi, namun dalam peraturan menteri tersebut mengabaikan salah tujuan daripada skema bagi hasil *gross split* tersebut, yaitu menyederhanakan system birokrasi dengan memberikan kebebasan pada kontraktor yang bekerja sama dengan investor dapat memilih bentuk skema bagi hasil selain skema bagi hasil *gross split*.

Oleh karena itu, dengan skema *gross split* biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin efisien kontraktor maka keuntungannya semakin baik.⁸ Pemerintah tidak perlu lagi mengawasi anggaran pengembalian biaya (*cost recovery*) dan pemilihan teknologi yang digunakan, pengawasan hanya untuk besaran produksi minyak dan gas bumi.⁹ Menyikapi persoalan tersebut maka penulis tertarik membahas hal ini

⁸ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr, 01 Januari 2020.

⁹ <https://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-minyak-dan-gas-bumi-gross-split>, tanggal 1 Januari 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL *GROSS SPLIT* TERHADAP DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pembahasan mengenai skema bagi hasil *gross split* terhadap daya investasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi yaitu wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dirumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis skema bagi hasil *gross split* terhadap daya investasi saham kontraktor pada industri hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*?
2. Apa kendala skema bagi hasil *gross split* terhadap daya investasi pada industri minyak dan gas bumi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis skema bagi hasil *gross split* terhadap daya investasi saham kontraktor pada industri hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*.
- b. Untuk mengetahui kendala skema bagi hasil *gross split* terhadap daya investasi pada industri minyak dan gas bumi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan pembaca atau akademisi serta dapat di jadikan referensi bagi yang membahas tentang usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis kepada praktisi hukum yaitu kepada penegak hukum, lembaga peradilan, pihak perusahaan minyak dan gas bumi , konsultan hukum serta pihak lain mengenai pertambangan di Indonesia sehingga kedepannya pertambangan minyak dan gas bumi semakin mensejahterakan rakyat.

- c. Membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan kontrak bagi hasil.
- d. Dapat bermanfaat terhadap investor swasta maupun asing yang ingin melakukan kerjasama dalam perindustrian minyak dan gas bumi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan kepustakaan mengemukakan beberapa ketentuan dan batasan yang menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Adapun Tinjauan Kepustakaan tentang proposal ini, adalah sebagai berikut:

1. Minyak dan gas bumi

Secara khusus pertambangan Minyak dan Bumi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi mendefinisikan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁰

Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi umumnya ditemukan di kedalaman ribuan kaki di bawah permukaan tanah. Dengan teknologi yang ada sekarang, tanpa melakukan

¹⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeboran eksplorasi, geologis tidak mungkin dapat mengidentifikasi dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi apakah ada atau tidak kandungan minyak dan gas bumi pada suatu lokasi tertentu dalam jumlah yang ekonomis untuk diproduksi.¹¹

2. Kontrak Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak dikenal oleh KUH Perdata atau dikatakan sebagai kontrak innominaat. Kontrak innominaat ini lahir dan berkembang dalam masyarakat karena kedudukannya itu, kontrak innominaat ini bersifat khusus dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur oleh KUH Perdata. Khusus dalam arti kontrak innominaat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹²

Ide *Production Sharing Contract* tercetus dari Ibnu Sutowo, setelah menjadi Presiden Direktur PERMINA (Cikal bakal Pertamina) dan Menteri Minyak dan gas bumi tahun 1965. Dua pihak yakni pemerintah dan perusahaan minyak bisa berbagi hasil produksi minyak dan gas bumi, bukan bagi hasil penjualan minyak dan gas bumi seperti kontrak karya. Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Skema PSC sudah mengalami beberapa perubahan. Yang saat ini dipakai merupakan generasi ketiga sejak 1988. Dalam skema ini, negara mendapatkan bagi hasil sebesar 85

¹¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan gas bumi* (Jakarta:Djambatan, 2000), h. 1.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persen, sisanya kontraktor. Sedangkan untuk kontrak gas, sebanyak 70 persen bagi negara.

Namun, skema *cost recovery* ini kerap menimbulkan perdebatan. Penggantian biaya kepada kontraktor sering dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dituding berpotensi merugikan negara. Dalam menentukan besaran *cost recovery*, juga kerap terjadi saling curiga antara kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi (SKK Minyak dan gas bumi). “Siapa yang berkompeten menentukan nilai sebuah teknologi dan besaran *cost recovery*,” kata seorang pejabat di Kementerian Energi.

Untuk itu, pemerintah merancang skema kontrak baru yakni *gross split*. Skema ini tidak lagi menyertakan komponen *cost recovery*. Alhasil, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan menanggung seluruh biaya operasi hulu minyak dan gas bumi . Sebaliknya, pemerintah hanya mendapatkan pembagian produksi.¹³

3. Perusahaan Pertambangan

Kegiatan bisnis minyak dan gas bumi (minyak dan gas bumi) telah menjadi bagian perjalanan bangsa Indonesia. Secara umum, kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni kegiatan hulu minyak dan gas bumi (upstream) dan kegiatan hilir minyak dan gas bumi (downstream). Inti dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah

¹³ [https://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-minyak dan gas bumi -gross-split](https://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-minyak%20dan%20gas%20bumi-gross-split), tanggal 1 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari (eksplorasi) dan mengangkat minyak dan gas bumi dari dalam perut bumi (eksploitasi). Sedangkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi pengolahan minyak dan gas bumi serta mendistribusikan dan memperdagangkan hasil olahan minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.¹⁴ Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.¹⁵ Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.¹⁶ Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.¹⁷ Kegiatan eksplorasi memerlukan suatu kajian yang panjang dan kompleks, karena cadangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilihat secara kasatmata, dan berada jauh di bawah permukaan tanah. Cadangan minyak dan gas bumi atau hidrokarbon di Indonesia umumnya berada di cekungan belakang busur, yakni cekungan sedimen yang terletak di belakang busur vulkanik. Minyak dan gas bumi juga terdapat di cekungan tepi benua.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum.¹⁸ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split* dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal, makalah, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder dalam bentuk kamus, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, jurnal hukum maupun lainnya.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Mengumpulkan buku-buku atau literatur, baik primer, sekunder maupun tersier yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.
- 2) Menelaah bahan-bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam lembaran khusus sesuai dengan penelitian.
- 3) Mengklasifikasikan catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis isi, yakni mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis, data di analisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dimana suatu analisis data yang bertitik tolak dari peraturan peraturan hukum positif.

5. Teknik Penulisan

- 1) Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- 2) Induktif, yaitu rekayasa dari berbagai macam kasus yang kemudian dikembangkan menjadi suatu penalaran yang menggabungkan kasus-kasus khusus tersebut dalam suatu pemahaman umum.
- 3) Deskriptif, mengumpulkan data kemudian menyusun menjelaskan, dan menganalisa.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM SKEMA *GROSS SPLIT*

Bab ini berisi gambaran-gambaran umum tentang konsep skema bagi hasil *gross split*.

BAB III

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Perjanjian, Investasi Saham, Industri Minyak dan gas bumi, dan lain-lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang didukung dengan literatur yang telah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran untuk pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN UMUM SKEMA BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

A. Pembentukan Skema Bagi Hasil *Gross Split*

Pemerintah tahun 1967 mengeluarkan sistem kontrak *Production Sharing Contract*, sistem ini dianggap lebih merepresentasikan Pasal 33 dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 daripada sistem konsesi sebelumnya. Hal ini dikarenakan, dalam sistem ini negara tetap merupakan penguasa sumber daya alam. Sistem *Production Sharing Contract* (PSC) ini juga diharapkan untuk jangka panjangnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yakni menjadikan negara ini dapat mengelola sendiri sumber daya minyak dan gas bumi-nya sendiri.¹⁹

Sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia telah berkontribusi terhadap penerimaan negara yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, penerimaan pemerintah dari sektor hulu minyak dan gas bumi mencapai 33% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2015 turun menjadi 20.6% dan pada 2016 hanya mencapai 7.7%. Turunnya presentase ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tinggi rendahnya harga minyak yang dipengaruhi dinamika industri minyak dan gas bumi global, dan produksi atau lifting yang cenderung turun belakangan ini. Di samping itu naiknya penerimaan dari sektor-

¹⁹ Andrey Hernandoko, *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, (Jurnal), Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sektor non-minyak dan gas bumi telah meningkatkan penerimaan APBN yang berdampak secara presentase terhadap total APBN. Menurunnya produksi dikarenakan alam yang sudah tua dan cadangan yang tidak dapat diperbaharui dengan cepat serta peningkatan konsumsi mengakibatkan negara Indonesia menjadi net importir di tahun 2004. Ditambah lagi harga minyak yang melonjak tinggi menyebabkan pemerintah menyubsidi bahan bakar minyak dalam negeri.

Produksi minyak hanya menghasilkan 815.000 barel per hari dan gas 1.150 barel setara minyak per hari. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan konsumsi minyak Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang sedang turun, mengakibatkan aktifitas sektor hulu menjadi lesu dibanding dengan negara tetangga. Menurut *Global Opportunity Index Ranking* yang diterbitkan Milken Institute, daya tarik investasi di Indonesia menduduki peringkat 79. Ada empat indikator yang digunakan, yakni fundamental ekonomi; kemudahan melakukan bisnis; kualitas regulasi; dan peraturan perundang-undangan. Dari empat indikator tersebut, kemudahan melakukan bisnis adalah indikator terburuk bagi Indonesia. Jika dibandingkan antara PSC di Malaysia dan Indonesia, Indonesia dalam pembagian keuntungan besarnya hanya menerima lebih sedikit daripada Malaysia. Di Malaysia keuntungannya hanya dibagi 50% untuk pemerintah dan 50% untuk Kontraktor. Berbeda dengan Indonesia yang terbebani dengan adanya *cost recovery*. Pemerintah hanya mendapatkan bagian sebesar 20% dan ini disebabkan oleh *cost recovery*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2016 misalnya, target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) untuk *cost recovery* adalah USD 8 miliar. Namun realisasi *cost recovery* membengkak sampai USD 10,4 miliar.²⁰ Tentu permasalahan ini menjadikan perhatian serius oleh pemerintah dikarenakan kegiatan eksplorasi hanya sedikit. Jika kegiatan eksplorasi sedikit maka jumlah cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia juga sedikit, pada tahun 2014 investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja eksploitasi maupun eksplorasi terus menurun. Tahun 2014 total biaya eksplorasi mencapai Rp 31,01 triliun, namun pada tahun 2016 turun menjadi 13 triliun.²¹

Ini berarti dalam sektor minyak bumi negara Indonesia telah mengalami masalah pada ketahanan energi. Dalam masalah ketahanan energi terjadi karena jumlah *lifting* minyak bumi terus turun yang disebabkan karena meningkatnya gangguan fasilitas operasi dan penyaluran; penurunan kinerja *reservoir* dari lapangan-lapangan produksi yang ada; belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar; timbulnya permasalahan teknis pengadaan peralatan produksi; realisasi produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan; dan kendala untuk merealisasikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi seperti proses perizinan dan pengadaan tanah yang memerlukan proses yang panjang.

²⁰ [https://ekbis.sindonews.com/berita/1140828/34/cost-recovery-minyak dan gas bumi-berpotensi-membengkak-dari-apbnp](https://ekbis.sindonews.com/berita/1140828/34/cost-recovery-minyak-dan-gas-bumi-berpotensi-membengkak-dari-apbnp), tanggal 15 Januari 2021.

²¹ [https://www.skkminyak dan gas bumi.go.id/detail/2325/skk-minyak dan gas bumi-selenggarakandialogkinerjaeksplorasi](https://www.skkminyak-dan-gas-bumi.go.id/detail/2325/skk-minyak-dan-gas-bumi-selenggarakandialogkinerjaeksplorasi), tanggal 15 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masalah lain yang dihadapi dalam sektor hulu minyak dan gas bumi adalah tata kelola minyak dan gas bumi. SKK Minyak dan gas bumi sebagai yang menjalankan fungsi manajemen kegiatan hulu minyak dan gas bumi memiliki kelemahan. Misalnya pada tahun 2014, terdapat pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya ke dalam *cost recovery* Kewajiban Kontraktor kepada pemerintah atas *overlifting* tahun 2013 belum dilunasi, dan penjualan kondensat belum dibayar pembeli. Akibatnya, terjadi kekurangan penerimaan senilai Rp 6,19 triliun. Selain itu, penunjukan penjual minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara melalui pelelangan terbatas selama 2009-2013 kepada perusahaan berbadan hukum asing serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia tidak didukung kontrak atau *Seller Appointment and Supply Agreement* (SASA) dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, diantaranya terdapat pemenang lelang wilayah kerja yang tidak memenuhi persyaratan finansial, dan adanya Kontraktor yang terkendala dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya, terutama kontraktor dalam tahap Ekspolrasi. Hasil temuan BPK atas *cost recovery* beberapa Kontraktor untuk tahun buku 2004 dan 2005 mencerminkan masih perlunya peningkatan kontrol pada implementasi *cost recovery*. Nilai seluruh temuan pemeriksaan BPK itu lebih dari Rp 14,20 Trilyun. Jumlah ini merupakan nilai koreksi pengurangan *cost recovery* yang direkomendasikan oleh BPK untuk perhitungan bagi hasil sesuai *Production Sharing Contract* pada lima kontrak kerja sama tersebut.

Semua Permasalahan ini menjadikan negara Indonesia mulai bergerak untuk mencari solusi semua masalah tersebut. Pada awal tahun 2017 Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengumumkan adanya sistem bagi hasil yang baru yakni Sistem Kontrak Bagi Hasil *Gross split*. Sistem bagi hasil ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Bagi Hasil *gross split*. Sistem ini meniadakan *cost recovery* dari perjanjian dan semua biaya operasi akan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Setelah kebijakan ini dikeluarkan, tentu banyak pro dan kontra tentang penerapan *Gross split* oleh Pemerintah. Banyak penilaian bahwa *gross split* akan menurunkan daya tarik investasi minyak dan gas bumi di Indonesia dan ada juga yang berpendapat bahwa *Gross split* dapat menarik investor dan dapat menyelematkan keuangan negara. Berdasarkan uraian diatas maka dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perbedaan antara *cost recovery* dengan *gross split* dan mengetahui dampak perubahan kontrak bagi hasil *cost recovery* ke kontrak bagi hasil *gross split* terhadap investasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

B. Pengaturan Skema Bagi Hasil *Gross Split*

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur kontrak bagi hasil *gross split* membawa skema baru dalam investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi di Tanah Air. Melalui aturan itu blok yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang akan menggunakan kontrak bagi hasil *gross split*. Sedangkan untuk wilayah kerja yang habis kontraknya dan diperpanjang maka pemerintah dapat menetapkan bentuk kontrak kerja sama semua atau bentuk *gross split*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan tersebut juga memuat tentang tiga komponen penentu besaran bagi hasil minyak dan gas bumi antara negara dan kontraktor. Skema ini berbeda dengan bentuk kerja sama sebelumnya yang menggunakan sistem *cost recovery* atau penggantian biaya operasional oleh negara. Dalam kebijakan baru tersebut, modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

Penghitungan bagi hasil *gross split* memuat tiga indikator yakni komponen dasar, variabel, dan progresif. Komponen awal digunakan sebagai acuan dasar penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan. Sementara komponen variabel dan progresif untuk menambah dan mengurangi komponen dasar. Besaran komponen variabel dan progresif bervariasi dari 0 hingga 16 persen.



Skema Kontrak Minyak dan gas bumi
 Gambar 1 : Sumber Katadata.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cost Recovery	Gross Split
<ul style="list-style-type: none"> • Cost Recovery Menjadi Beban Pemerintah Biaya operasi yang pada awalnya dikeluarkan oleh kontraktor, pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah (cost recovery) • Cost Recovery Tidak Efisien Karena pada akhirnya ditanggung pemerintah • Sejak Tahun 2015, Cost Recovery Lebih Besar dari Penerimaan Migas Negara • Persetujuan Cost Recovery Rumit dan Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Operasi Menjadi Beban Kontraktor • Kontraktor Secara Alami Akan Melakukan Penghematan • Penerimaan Migas Negara Lebih Pasti Karena tidak terpengaruh oleh besarnya cost recovery • Birokrasi Lebih Efisien dan Sederhana Karena tidak ada proses persetujuan cost recovery oleh pemerintah

Perbandingan Skema Kontrak Minyak dan gas bumi antara PSC dan *Gross split*
Gambar 1 : Sumber Kementerian ESDM Republik Indonesia

Sejak terbit Januari 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 kerap menuai respons yang kurang memuaskan dari pelaku industri. Untuk itu Kementerian ESDM mengubah aturan tersebut dengan melibatkan para pelaku industri minyak dan gas bumi, salah satunya adalah Indonesian Petroleum Association (IPA). Dalam pertimbangan untuk meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam kontrak bagi hasil *gross split* sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split*. Pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi yang mengatur penerapan skema tersebut, yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (Permen ESDM) Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.²²

²² <https://minyakdanGasBumi.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-permen-nomor-52-tahun-2017-tentang-revisi-kontrak-gross-split>, Tanggal 15 Januari 2021.

C. Kedudukan Skema Bagi Hasil *Gross Split* dalam Sistem Perindustrian Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Secara hierarki regulasi kedudukan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 ini baik pra maupun pasca perubahan tidak lebih tinggi dari Peraturan Menteri di sektor lain. Akibatnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ini tidak dapat digunakan untuk mengikat atau memaksa sektor yang lain untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya. Sehingga keberadaan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ini pada dasarnya belum dapat menjadi solusi permasalahan jika kegiatan hulu minyak dan gas bumi mengalami permasalahan lintas sektor seperti masalah perpajakan dan lingkungan hidup.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

LANDASAN TEORI

A. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²³ Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Sementara itu, menurut pendapat lain, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus

²³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁴ Dari pengertian diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana.²⁵

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁶

Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis menggunakan istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-

²⁴ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.2.

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,), Cet.8, h.328.

²⁶ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hl 2.

Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.²⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu;

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis.

Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.²⁸ Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau

²⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet.6, h.92.

²⁸ Salim, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet 5, h.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Sesuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan mempekerjakan tenaga kerja

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.

d. Sebab halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa* yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian.

3. Macam-Macam Perjanjian

Menurut Daris (2001), terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian Atas Beban, adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama (Benoemd), adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.
5. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst), adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
6. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Perjanjian Riil, di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian, adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan, adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
13. Perjanjian Publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
14. Perjanjian Campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan²⁹.

Dalam makna perjanjian atau kontrak tidak memiliki perbedaan, hal ini dapat disimak dari judul Buku II Burgerlijk Wetboek tentang perikatan yang menggunakan istilah *overeeenskommst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa

²⁹ Daris dan Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aslinya (Belanda), “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Oleh sebab itu konsep perjanjian atau kontrak adalah konsep yang bermakna sama. Dalam makna yang sama maka perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penelitian ini adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 BW dan terbatas pada perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu suatu perjanjian kerjasama yang terbatas pada penyediaan pelayanan publik³⁰.

4. Penyusunan, Struktur, Dan Anatomi Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka selayaknya mentaati suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak.³¹

Adapun dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan dalam kontrak tersebut:

1. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing);
2. Obyek perjanjian (hal apa yang yang menjadi dasar kerja sama);

³⁰ Zainal Asikin, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, (Jurnal), Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1, Februari 2013 h. 59.

³¹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak dan kewajiban para pihak;
4. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir;
5. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya;
6. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (overmacht);
7. Ketentuan penyelesaian perselisihan,
8. Tandatangan para pihak.

Adapun mengenai anatomi suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak secara strukturnya adalah sebagai berikut:³²

1. Judul kontrak, dimana dalam suatu kontrak judul harus dibuat dengan singkat, padat, jelas dan sebaiknya memberikan gambaran yang ditangkan dalam perjanjian tersebut. Contohnya Perjanjian Jual-Beli, Perjanjian Sewa menyewa
2. Awal kontrak, dalam awal kontrak dibuat secara ringkas
3. Para pihak yang membuat kontrak, di bagian ini disebutkan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penyebutan para pihak mencakup nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak untuk siapa.
4. *Premis (Recital)* merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya kesepakatan.

³² Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, (Jurnal), Mazahib, Vol. XIV, No.1 Juni 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Isi kontrak, dalam isi perjanjian biasa diwakili dalam pasal-pasal dan dalam setiap pasal diberi judul. Isi suatu perjanjian biasanya meliputi 3 unsur yaitu *essensalia*, *naturalia*, *accidentalia* dan ketiga unsur tersebut harus ada pada setiap perjanjian. Unsur lain yang terpenting yang harus ada adalah penyebutan tentang upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa.
6. Akhir kontrak (penutup), pada bagian akhir perjanjian berisi pngesahan kedua belah pihak dan saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari perjanjian.

B. Teori Investasi Saham

1. Pengertian Investasi dan Saham

a. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³³ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor *rill* (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (*deposito*, saham atau *obligasi*), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam

³³ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta, BPFE, 2001), Edisi 1, Cet. 1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode waktu tertentu.³⁴ Sedangkan menurut pendapat lain, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.³⁵

b. Pengertian Saham

Saham merupakan bukti dari kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemilik saham suatu perusahaan, disebut sebagai pemegang saham, merupakan pemilik perusahaan. Tanggung jawab pemilik perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada modal yang disetorkan. Saham di Indonesia yang diterbitkan oleh perusahaan dan di jual di pasar modal, mempunyai nilai nominal Rp 1.000

³⁴ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta, BPFE, 2003), Edisi.3, Cet.1, h.5.

³⁵ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (Jurnal), Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Rp 500 perlembarnya.³⁶ Saham berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Saham atas nama

Nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut. Apabila saham ini hilang, maka pemiliknya dapat meminta penggantian karena namanya sudah ada didalam buku perusahaan yang khususnya memuat daftar nama pemegang saham tersebut.

2) Saham atas unjuk

Yaitu kepemilikan saham tidak tertera diatas saham, tetapi pemilik saham adalah yang memegang saham tersebut. Seluruh hak-hak pemegang saham akan diberikan pada penyimpan saham tersebut. Yang artinya siapapun bisa memegang saham ini, karena dapat dianggap sebagai pemilik saham tersebut.

3) Hak tagihan (Klaim)

Di tinjau dari manfaatnya, saham di bagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Adapun karakteristik masing-masing jenis saham tersebut adalah sebagai berikut :

a) Saham Biasa

- (1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
- (2) Pemegang saham memiliki hak suara.

³⁶ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Skuritas*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Edisi.5, h.249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

(3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan bangkrut.

b) Saham Preferen

(1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.

(2) Tidak memiliki hak suara

2. Pasar Modal

Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (investor) dengan peminjam dana (*Emiten*).³⁷ Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasar modal adalah fasilitas untuk menjembatani pemilik modal dengan peminjam dana dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan investasinya dari tabungan sendiri. Dalam realita, ada unit-unit kegiatan ekonomi yang surplus (yaitu tabungan > investasi) dan ada unit ekonomi defisit (yaitu tabungan < investasi). Untuk itu dibutuhkan “*conduit*” yang bisa menyalurkan kelebihan dana dari unit yang surplus ke yang defisit. Sedangkan menurut pendapat lain, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang dapat di perjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang di terbitkan pemerintah, maupun perusahaan swasta.³⁸

³⁷ Panji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.5.

³⁸ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Skuritas*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) Edisi III, Cet. 2, h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal adalah tempat dimana bertemunya pemilik modal dengan peminjam dana, atau dapat dikatakan tempat bertemunya *supply* dan *demand* terhadap dana jangka panjang. Sedangkan tempat bertemunya penawaran permintaan dana jangka pendek adalah pasar uang.

3. Untung Rugi Investasi Saham

Dalam dunia investasi, terdapat dua keuntungan yang akan didapatkan jika terjun ke investasi saham, yaitu:

a) *Dividen*

Dividen merupakan pembagian laba yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. *Dividen* berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. *Dividen* itu sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu tunai dan saham.

- (1) *Dividen* tunai yang dibagikan, berarti perusahaan akan memberikan uang tunai kepada pemegang saham per satu lembar saham yang mereka miliki.
- (2) Sedangkan *dividen* saham artinya perusahaan tersebut memberikan *dividen* berupa saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah.

Akan tetapi, ada juga perusahaan yang tidak membagikan *dividen* kepada pemegang saham walaupun mereka memperoleh laba. Umumnya perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi atau mengembangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha. Tapi biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan yang dalam tahap pengembangan.³⁹

b) *Capital Gain* (kenaikan harga saham)

Capital gain merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Jadi, harga jual harus lebih tinggi ketimbang harga beli. Nah, *capital gain* itu umumnya terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan di bursa efek.

Sama halnya dengan keuntungan, investasi saham juga memiliki dua risiko dalam pelaksanaannya, yaitu:

a) *Capital loss*

Risiko pertama yang potensi dialami dari investasi saham itu adalah kebalikan dari *capital gain* yaitu *capital loss*. Ini terjadi ketika harga jual lebih rendah dibanding harga beli.

b) *Suspend*

Selain *capital loss*, *suspend* merupakan salah satu risiko dari investasi saham. Sebagaimana dimaksud adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Dengan begitu, berarti para investor tidak bisa menjual sahamnya hingga suspend-nya dicabut. Jangka waktunya pun bervariasi. Namun pada umumnya suspend

³⁹ <https://lifepal.co.id/media/ketahui-keuntungan-dan-risiko-investasi-saham/>, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung dalam waktu singkat yaitu satu hari perdagangan. Namun, kadang ada juga *suspend* yang berlangsung selama beberapa hari.

Ada beberapa sebab yang membuat bursa efek memberhentikan perdagangan saham perusahaan tersebut. Berikut ini antara lain penyebabnya.

- (1) Harga saham turun drastis dalam waktu singkat.
- (2) Perusahaan dipailitkan oleh kreditornya.
- (3) Perusahaan tidak memberikan persyaratan yang diminta oleh otoritas bursa. Seperti misalnya tidak memberikan laporan keuangan hingga waktu yang ditentukan.

Bursa efek kemudian akan melakukan analisa apakah suspend perusahaan tersebut bisa dicabut atau tidak.

C. Teori Industri Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Industri Minyak dan Gas Bumi

Dunia industri perminyakan (minyak dan gas bumi) adalah industri yang berbisnis untuk mengangkat cadangan minyak dan gas (hidrokarbon) yang ada di bawah bumi menuju ke permukaan. Sifat industri minyak dan gas bumi adalah sebuah industri yang mahal (membutuhkan biaya besar), global, dan penuh dengan resiko. Industri minyak dan gas bumi memerlukan peralatan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi yang canggih agar dapat memastikan adanya hidrokarbon di bawah bumi.⁴⁰

Industri minyak dan gas bumi atau perminyakan sudah berkembang sejak awal era 1900an di era *rockefeller* dengan standar oilnya. Industri minyak bumi mencakup pemrosesan global minyak bumi, mulai dari eksplorasi, ekstraksi, pengilangan, transportasi (biasanya melalui tanker minyak dan transportasi jalur pipa), serta pemasaran produk minyak bumi. Volume produk terbesar dari industri ini adalah bahan bakar minyak dan bensin. Minyak bumi juga menjadi bahan mentah banyak produk kimia seperti obat, pelarut, pupuk, pestisida, dan plastik. Industri ini biasanya dibedakan menjadi 3 komponen utama: hulu, menengah, dan hilir. Operasi menengah biasanya dimasukkan dalam kategori hilir. Minyak bumi sangat vital bagi banyak industri dan penting bagi kelangsungan peradaban industri, maka menjadi perhatian penting banyak negara.⁴¹

Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH₄). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas Bumi dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia

⁴⁰ <https://www.safetyshoe.com/industri-perminyakan-adalah-sakramen-industri-minyak-dan-gas-bumi/>, tanggal 28 Februari 2020.

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_minyak_bumi, tanggal 28 Februari 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.⁴²

2. Industri minyak dan gas bumi di Indonesia

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang luas keterkaitannya dengan industri lainnya, untuk mempermudah memetakan end to end bisnis mulai dari pencarian minyak hingga penjualan minyak dan gas bumi, berikut ini klasifikasi aktivitas industri minyak dan gas bumi:

a) Kegiatan Hulu

Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan kegiatan eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi minyak dan gas bumi yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

b) Kegiatan Hilir

Kegiatan usaha hilir terdiri atas kegiatan usaha Pengolahan (Refinery), Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.⁴³

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam, Tanggal 28 Februari 2020.

A. Kesimpulan

Skema bagi hasil *gross split* adalah skema baru yang diterapkan industri minyak dan gas bumi di Indonesia sejak tahun 2017 menggantikan skema *cost recovery* yang telah berjalan sejak tahun 1967. Skema bagi hasil *gross split* tersebut diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
2. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Tujuan diterbitkan skema bagi hasil *gross split* ini adalah untuk memperbaiki iklim investasi serta menyederhanakan system birokrasi pada industri minyak dan

gas bumi di Indonesia, namun tujuan tersebut dinilai tidak tercapai sehingga mempengaruhi daya investasi saham kontraktor minyak dan gas bumi. Bentuk pengaruh daya investasi saham kontraktor tersebut adalah tidak tertariknya investor melakukan penanaman saham pada kontraktor minyak dan gas bumi adalah:

1. Faktor Fiskal dan Regulasi

Faktor fiskal dan regulasi adalah resiko yang berasal dari kebijakan dan aturan pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi investor. Ini berkaitan dengan resiko bisnis yang akan dihadapi kontraktor maupun investor jangka panjang.

2. Faktor kepentingan lintas sektor

Faktor kepentingan lintas sektor adalah faktor kepastian hukum pendukung pelaksanaan yang mengakomodir berbagai macam kebutuhan dan situasi kondisi, seperti sektor lingkungan hidup dan pertanian.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan tentang investasi industri minyak dan gas bumi kepada:

1. Pemerintah dalam hal ini kementerian energi sumber daya dan mineral agar membuat aturan pendukung skema bagi hasil *gross split* pada sektor lainnya. Karena skema bagi hasil *gross split* adalah produk baru yang bertujuan sebagai pengganti skema bagi hasil *cost recovery*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dirasa perlu mempehatikan sektor pendukung lain guna menyesuaikan peraturan tersebut, seperti sektor lingkungan hidup, pertanian, dan lain-lain.

2. Kontraktor dan Investor minyak dan gas bumi agar dapat mempelajari peraturan langsung kepada pihak pemerintah dan dapat memberikan masukkan-masukkan kepada pemerintah. Sehingga tercapainya iklim kerja sama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Affina Niken Al-Islami, *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak dan gas bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 9 tahun 2013)*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Daris, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Dharmasisya, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, ((Jakarta: 2021) Volume 1
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200803/44/1274350/kontraktor-minyak-dan-gas-bumi-berharap-fleksibilitas-tidak-hanya-di-atas-kertas>
- <https://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-minyak-dan-gas-bumi-gross-split>
- https://kominform.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr
- <https://lifepal.co.id/media/ketahui-keuntungan-dan-risiko-investasi-saham/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e47f7974646/kepastian-landasan-hukum-kontrak-bagi-hasil-igross-split-i-oleh--adhi-eko-martantyo>
- <https://www.safetyshoe.com/tag/industri-minyak-dan-gas-bumi/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Laporan Konstektual Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2015
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2013
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2014
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2015
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2016
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2017
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Site Islamia University of Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2019

Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2020

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya
dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya
dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan
Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split*

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-Syarat dan Pedoman
Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan gas bumi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 Tahun 2003

Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan gas bumi*, Jakarta: Djambatan, 2000

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Zainal Asikin. Jurnal, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta
Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, Mimbar Hukum, Vol.25, 2013

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil Gross Split Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak"* yang ditulis oleh :

Nama : **NANANG TIO ANDIKA**
 NIM : **11427103827**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 30 Juni 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring/ Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NANANG TIO ANDIKA
NIM : 11427103827
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT
TERHADAP DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA
INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
Pembimbing : H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Nanang Tio Andika lahir di Medan, pada tanggal 11 Juni 1995 merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Supriadi dan Samini, serta memiliki 4 saudara kandung se-ibu dan 1 saudara kandung se-ayah. Memiliki darah suku Jawa yang berasal dari ayah keturunan kakek yang bernama Wagino dan nenek yang bernama Legiyem, dan memiliki darah suku Betawi yang berasal dari Ibu keturunan kakek yang bernama Saleh keturunan suku Betawi, dan Nenek keturunan suku Jawa. Saudara/i kandung se-ayah dan se-ibu ialah Muhammad Rizal Effendi (se-ibu), Susi Eliawati (se-ibu), Sri Handayani (se-ibu), Rianti (se-ibu), Ning Sri (se-ayah), Nanang Tio Andika, Yogi Prastio, Yuda Perwira. Mengawali Pendidikan Dasar di SD Negeri 050641 Namotongan selama 6 tahun serta menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di TPI (Taman Pendidikan Islam) Namotongan selama 5 tahun dan selesai pada tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Salapian dan menamatkan studi pada tahun 2010. Lalu penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMA Negeri 13 Pekanbaru mengambil jurusan IPA, dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis.

Selama di bangku perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan magang di pertengahan tahun 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Selama belajar di UIN SUSKA RIAU penulis melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP DAYA INVESTASI SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI**. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juni 2021 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.